

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017

Ajeng Apridiyanti

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
Jl. Japati No. 2 Lebakgede kec. Coblong, Bandung
apridiyantiajeng21@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine the effect of Regional Original Income (PAD) on the financial performance of district and city governments in West Java in 2013-2017. This study uses local taxes, regional levies, wealth investment returns, collected and others, legitimate local revenue as a control variable. Data analysis method used is multiple regression. The results showed that PAD as a whole had a significant effect on the financial performance of local governments in West Java. However, only a portion of local revenue is significantly positive for financial performance.

Keywords: Regional taxes, regional levies, separate regional wealth management results, other legitimate regional revenues, Regional Original Revenue (PAD), Financial Performance.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel kontrol. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Namun secara parsial hanya lain-lain pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004). Otonomi daerah memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi daerah dalam rangka memperlancar pembangunan daerah (Zaenuddin, 2018). Proses pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat bertumpu pada PAD daerah tersebut dalam rangka memberlakukan kewenangan dari adanya otonomi daerah (Dhia wenny, 2012). Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 bab V (lima) nomor 1 (satu) menyatakan bahwa PAD terdiri dari: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) lain-lain pendapatan yang sah. Semakin besarnya kemampuan daerah dalam memperoleh PAD akan mengurangi ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Dhia wenny, 2012).

PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat berperan dalam meningkatkan kemandirian daerah tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa semakin mandiri kinerja pemerintah daerah semakin baik (Florida,

2007). Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis. Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan kekayaan asli atau PAD. PAD pada kabupaten dan kota di Jawa Barat belum semuanya dapat memalsimalkan PAD yang diperoleh, menurut Yayat Hidayat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung pertumbuhan PAD kabupaten Bandung dinilai lambat (PikiranRakyat, 2019) selain itu Epi sebagai DPRD Kota Bekasi menyampaikan bahwa ada beberapa Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bekasi yang memiliki pendapatan yang cukup rendah (Wartakota, 2016).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang beragam, (Dhia wenny, 2012) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara signifikan sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota (Florida, 2007). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui hubungan antara PAD dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 mendefinisikan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan penghasilan yang bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri (Halim, 2012). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari potensi daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (UU No. 33 Tahun, 2004), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan (UU No 28 Tahun, 2009).
- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dibedakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan (UU No 28 Tahun, 2009).
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004).

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan lain-lain (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004).

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Kualitas pengambilan keputusan dapat ditingkatkan menggunakan suatu alat manajemen yaitu penilaian kinerja keuangan (Whittaker, 1995). Kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pemerintah telah melakukan penggunaan anggaran keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah menggunakan rasio desentralisasi fiskal yaitu perbandingan antara total PAD dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2016). Menurut Mahmudi (2016) analisis rasio keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keu. Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Trans. Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kausal. Desain kausal menguji hubungan sebab dan akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono 2010:56). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data time series dari tahun 2013-2017.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 18 kabupaten dan 9 kota. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, dengan syarat yaitu kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang menyediakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2013-2017 yang memberikan gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan total Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Terdapat 2 kabupaten yang tidak memenuhi persyaratan sampel, sehingga penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan daerah 16 kabupaten dan 9 kota tahun 2013-2017.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 25. Data yang diolah diuji dengan uji asumsi klasik dan menggunakan teknik regresi berganda, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dimana:

- Y = Kinerja Keuangan
X1 = Pajak Daerah
X2 = Retribusi Daerah
X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
X4 = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 ϵ = Error

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximun	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	125	8293779164	2175084126326	353278202966,02	470341823616,740
Retribusi Daerah	125	4465347571	207275680214	43130393323,05	45813210341,944
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan	125	2148384172	66015053552	12356751743,16	13615325532,535
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	125	17347153303	1060859507031	226418556132,17	147689055316,068
Kinerja Keuangan	125	0,03	0,51	0,2105	,10902

Berdasarkan hasil pengelolaan data melalui metode deskriptif pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, nilai minimum sebesar Rp. 8.293.779.164,- diperoleh kota Banjar tahun 2013. Nilai maksimum diperoleh Kota Bandung tahun 2017 sebesar Rp. 2.175.084.126.326,-.
2. Retribusi Daerah, nilai minimum sebesar Rp. 4.465.347.571,- diperoleh kota Banjar tahun 2015. Nilai maksimum diperoleh kabupaten Bekasi tahun 2014 sebesar Rp. 207.275.680.214,-.
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, nilai minimum sebesar Rp. 2.148.384.172,- diperoleh kabupaten Kuningan tahun 2014. Nilai maksimum diperoleh kabupaten Bandung tahun 2017 sebesar Rp. 66.015.053.552,-.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, nilai minimum sebesar Rp. 17.347.153.303,- diperoleh Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013. Nilai maksimum diperoleh kabupaten bogor tahun 2017 sebesar Rp. 1.060.859.507.031,-.
5. Kinerja Keuangan, nilai minimum diperoleh kabupaten Tasikmalaya tahun 2014 sebesar 3%. Nilai maksimum diperoleh kota Bekasi tahun 2015 sebesar 51%.

Berdasarkan hasil analisis di atas, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Kota Bekasi pada tahun 2015 mendapat derajat desentralisasi tertinggi sebesar 51% yang artinya PAD kota Bekasi pada tahun 2015 lebih tinggi dari pendapatan lainnya selain PAD. Kota Bekasi dapat dikatakan menyelenggarakan desentralisasi dengan baik karena dapat menopang keperluan pemerintahan dengan hasil PAD lebih dominan. PAD tertinggi diperoleh melalui pajak daerah kemudian lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

2. Analisis Verifikatif

Berdasarkan hasil dari pengolahan data melalui metode analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel	Understandardized Coefficients		Beta	t _{hitung}	P
	B	Std. Error			
(Constant)	0,517	0,020		25,460	0,000
Pajak Daerah	-2,436E-13	0,000	-0,730	-8,639	0,000
Retribusi Daerah	-9,465E-13	0,000	-0,196	-2,410	0,017
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan	-3,049E-12	0,000	-0,188	-3,470	0,001
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7,479E-13	0,000	-0,499	9,071	0,000
R ² = 0,742					
F _{hitung} = 86,188					
p = 0,000					

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, maka model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = 0,1430 - 2,436E-13 X_1 - 9,465E-13 X_2 - 3,049E-12 X_3 + 7,479E-13 X_4$$

Berdasarkan hasil pengolahan dan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian mengenai pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -8,639 dengan p = 0,000, namun hasil koefisien regresinya -2,436E-13, yang artinya setiap kenaikan 1% dari pajak daerah diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar -2,436E-13 dengan asumsi variabel lain tetap. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

2. Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,410 dengan $p= 0,017$. Namun koefisien regresinya sebesar $-9,465E-13$, yang artinya setiap kenaikan 1% dari retribusi daerah diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar $-9,465E-13$, dengan asumsi variabel lain tetap. Dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian mengenai pengaruh hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -3,470 dengan $p= 0,001$. Namun koefisien regresinya sebesar $-3,049E-12$, yang artinya setiap kenaikan 1% hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar $-3,049E-12$, dengan asumsi variabel lain tetap. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian mengenai pengaruh hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,071 dengan $p= 0,000$ dan koefisien regresinya sebesar $7,479E-13$, yang artinya setiap kenaikan 1% lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian mengenai pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -8,639 dengan $p= 0,000$, namun hasil koefisien regresinya $-2,436E-13$, yang artinya setiap kenaikan 1% dari pajak daerah diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar $-2,436E-13$ dengan asumsi variabel lain tetap. Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa pajak daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pajak daerah maka kinerja keuangan semakin menurun. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Alfarisi, 2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2. Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,410 dengan $p= 0,017$. Namun koefisien regresinya sebesar $-9,465E-13$, yang artinya setiap kenaikan 1% dari retribusi daerah diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar $-9,465E-13$, dengan asumsi variabel lain tetap. Dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, semakin tinggi retribusi daerah maka akan menurunkan kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian (Dhia wenny, 2012) retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian mengenai pengaruh hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -3,470 dengan $p= 0,001$. Namun koefisien regresinya sebesar $- 3,049E-12$, yang artinya setiap kenaikan 1% hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan sebesar $- 3,049E-12$, dengan asumsi variabel lain tetap. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian (Dhia wenny, 2012) pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian mengenai pengaruh hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,071 dengan $p= 0,000$ dan koefisien regresinya sebesar $7,479E-13$, yang artinya setiap kenaikan 1% lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Dhia wenny, 2012) yang menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data melalui metode analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat secara parsial dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Barat sebesar 74,2% dan sisanya 25,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti.

Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Namun secara parsial hanya lain-lain pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Florida, 2007) menyatakan bahwa jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat berpengaruh dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan dari tahun ke tahun atas Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat atas dana yang diberikan pemerintah pusat, agar pemerintah daerah dapat dengan fleksibel menggunakan pendapatannya untuk membiayai kebutuhan atau belanja daerahnya sendiri, dengan demikian kinerja keuangan daerah tersebut meningkat ditandai dengan kemandirian yang meningkat (Anjani, Akram, & Handajani, 2016).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, retribusi daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan indikator lain dalam menghitung kinerja keuangan serta menambah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Negeri Padang*.
- Anjani, E. S. D., Akram, A., & Handajani, L. (2016). Hubungan Pad, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Nusa Tenggara Barat. *InFestasi*. <https://doi.org/10.21107/INFESTASI.V11I11.1121>
- Dhia wenny, C. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan PAda Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Florida, A. (2007). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. In *Salemba Empat*. <https://doi.org/ISBN: 978-979-061-226-6>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- PikiranRakyat. (2019). PAD Kabupaten Bandung Lambat Pertumbuhannya. *Pikiran Rakyat*.
- UU No. 33 Tahun. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. , (2004).
- UU No 28 Tahun. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , (2009).
- UU Nomor 32 Tahun 2004. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*.
- Wartakota. (2016). Lima SKPD Kota Bekasi Dinilai Gagal Maksimalkan Pendapatan. *Wartakota*.
- Whittaker, J. B. (1995). *The Government Performance and Results Act of 1993*

performance measurement. Arlington, Virginia: Educational Services Institute.

Zaenuddin, M. (2018). *Isu, Problematika dan Dinamika Perekonomian dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.